



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH
(BKPSDMD)**

**RENCANA KERJA
ANGGARAN
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan karunianya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2022 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan penjabaran pelaksanaan dari Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi, memuat tentang evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang akan berjalan maupun yang telah berjalan dan memuat gambaran target kinerja yang ingin di capai dengan tujuan agar pelaksanaan program/kegiatan lebih optimal.

Dan akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 ini dan semoga bermanfaat.

Muara Sabak, Januari 2022



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI	i
------------------	---

BAB I. PENDAHULUAN.....	ii
-------------------------	----

1.1 Latar Belakang.....	1
-------------------------	---

1.2 Landasan Hukum.....	1
-------------------------	---

1.3 Maksud dan Tujuan	2
-----------------------------	---

1.4 Gambaran Umum SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	3
---	---

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2021

2.1 Anggaran Belanja	7
----------------------------	---

2.2 Capaian Sasaran Program/Kegiatan	10
--	----

2.3 Capaian RENSTRA Sampai dengan Tahun 2021	14
--	----

BAB III. RENCANA KERJA TAHUN 2022

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDMD	18
--	----

3.2 Program dan Kegiatan	19
--------------------------------	----

3.3 Rincian Belanja Tahun 2022	21
--------------------------------------	----

3.4 Rincian Target Program dan Kegiatan Serta Pagu Anggaran 2022.....	22
---	----

BAB IV. PENUTUP.....	26
----------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel	1.1 Struktur Organisasi	6
Tabel	2.1 Realisasi Belanja Tahun 2021	7
Tabel	2.2 Realisasi Program Kegiatan	8
Tabel	2.3 Capaian Sasaran Kegiatan 2021	10
Tabel	2.4 Capaian RENSTRA Sampai Th 2021	14
Tabel	3.1 Rincian Belanja Tahun 2022	21
Tabel	3.2 Target Program dan Kegiatan Serta Pagu Anggaran	22

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

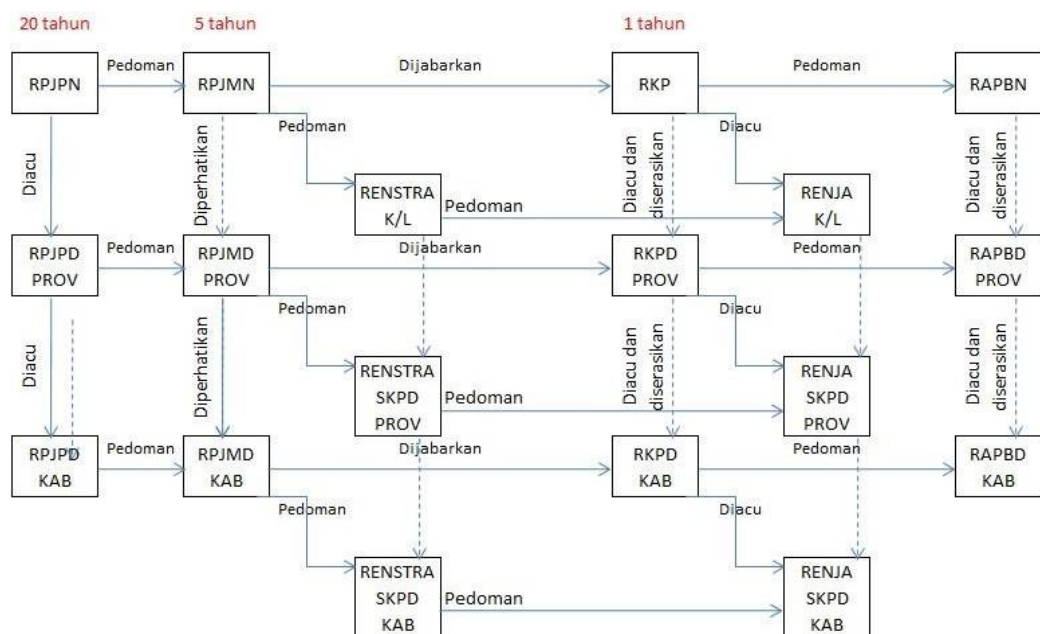
Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan

pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode Tahun 2022 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Renja BKPSDMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, Provinsi dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah. Renja BKPSDMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 disusun berdasarkan tahapan pada Rencana Strategis BKPSDMD Tahun 2021-2026. dan jugasebagai upaya pemulihan dari dampak *Corona Virus Disease 19*(yang sudah ditetapkan dengan Keppres RI Nomor 12/2020 sebagai bencana nasional) baik dari aspek ekonomi, kesehatan dan sosial masyarakat. Untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam situasi pemulihan dampak COVID- 19 khususnya untuk para Pegawai ASN tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan ASN sehingga perlu penyesuaian sistem kerja bagi Pegawai ASN dalam tatanan normal baru dengan menjalankan protokol kesehatan dalam aktifitas keseharian (Surat Edaran Kemenpan Nomor:58 Tahun 2020 tentang sistim kerja

pegawai aparatur sipil negara dalam tatanan normal baru). Adaptasi terhadap tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19 meliputi penyesuaian sistem kerja, dukungan sumber daya manusia aparatur, dukungan infrastruktur dengan memperhatikan protokol kesehatan. Kegiatan- kegiatan prioritas yang tertunda pelaksanaannya di tahun 2021 karena *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan *Corona Virus Disease 19* dimasukkan dalam Renja 2022 dengan formulasi program yang merupakan rangkuman guna pencapaian target. Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja BKPSDMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja tahun 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022 ;
14. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022;

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari Renja tahun 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dengan maksud untuk memberikan arah strategis sekaligus sebagai acuan resmi bagi seluruh komponen untuk melaksanakan program-program prioritas dan sekaligus sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan pemerintah daerah tahunan dalam rangka mengoptimalkan Visi dan Misi Daerah.

Adapun tujuan disusun Renja tahun 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah ini adalah :

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan seluruh potensi, kebutuhan dan pemecahan permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
2. Sebagai acuan pelaksanaan Program dan Kegiatan BKPSDMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama kurn waktu 1 Tahun
3. Memberikan arah yang jelas atas target keinerja dari masing-masing Program dan Kegiatan BKPSDMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022
5. Terpenuhinya dokumen perencanaan sebagai bahan evaluasi di akhir tahun anggaran,sehingga pengukuran keberhasilan dan kegagalan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dapat dinilai dan di ukur.

1.4 Gambaran Umum BKPSDMD

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah merupakan lembaga teknis daerah yang melaksanakan tugas pengelolaan kepegawaian daerah yang dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dengan uraian tugas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 21 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah sebagai unsur pelaksana pengelolaan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu

Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan Daerah dalam bidang Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dengan uraian tugas adalah sebagai berikut :

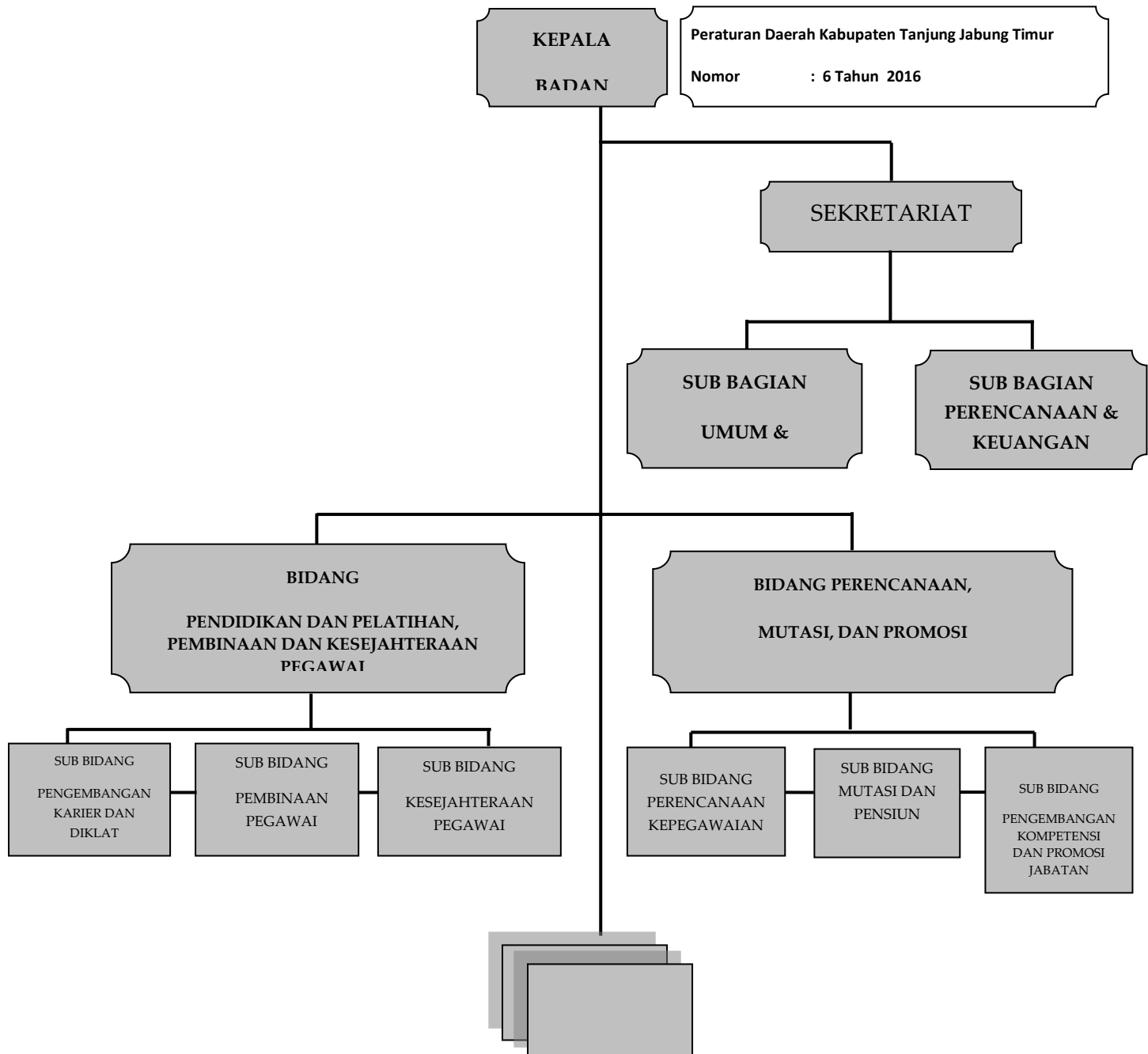
1. Merumuskan kebijakan teknis Pemerintah Daerah di bidang Kepegawaian Daerah;
2. Menghimpun dan mempelajari seluruh permasalahan bidang Kepegawaian Daerah dan memberikan alternatif pemecahan masalah;
3. Menyusun, menyiapkan dan mensosialisasikan produk hukum Daerah di bidang kepegawaian Daerah;
4. Merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang pengelolaan dan pembinaan kepegawaian Daerah sesuai kewenangan yang dimiliki Daerah;
5. Melaksanakan pelayanan penunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan dan pembinaan Kepegawaian Daerah yang meliputi informasi Kepegawaian, perencanaan dan keuangan, formasi dan mutasi pegawai, Diklat dan Pengembangan Karir Pegawai serta Pembinaan dan Disiplin Aparatur;
6. Melaksanakan perencanaan pengadaan, penerimaan dan pengangkatan pegawai;
7. Melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengendalian dan monitoring serta evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian Daerah;
8. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi dan fungsional;
9. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Badan;
10. Pemberian bimbingan, pengarahan, petunjuk teknis dan melakukan pengawasan di bidang tugasnya kepada bawahan;
11. Melaksanakan bimbingan, pembinaan dan evaluasi terhadap staf dalam lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah;
12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati;

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah mempunyai fungsi ;

1. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup Kepegawaian Daerah;
2. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dipimpin oleh seseorang Kepala Badan dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**



BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
TAHUN 2021

2.1 Anggaran Belanja

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabuoaten Tanjung Jabung Timur Pada Tahun 2021 mengusulkan 2 (Dua) Program dan 10 (Sepuluh) Kegiatan Serta 38 (Tiga Puluh Delapan) Sub Kegiatan Secara terperinci anggaran dan realisasi penyerapanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 2.1
REALISASI BELANJA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	BELANJA DAERAH	10.155.420.039	8.306.636.277	81,80
1	Belanja Operasi	9.853.959.637	8.008.444.427	81,27
2	Belanja Modal	301.460.402	298.191.850	98,92
Total		10.155.420.039	8.306.636.277	81,80

Berdasarkan tabel diatas, jumlah anggaran belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.10.155.420.039 ,sedangkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 8.306.636.277 atau 81,80 % dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada Belanja Operasi pagu anggaran sebesar Rp.9.853.959.637 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.8.008.444.427 atau 81,27 %
2. Pada belanja Modal pagu anggaran sebesar Rp.301.460.402, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.298.191.850, atau 98,92%.

Adapun rincian realisasi belanja langsung tahun 2021 berdasarkan program/kegiatan sebagaimana uraian tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Realisasi Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.725.365.716	6.546.784.120	178.581.596	97,34
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.406.000	25.982.989	16.423.011	61,27
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.232.000	15.109.789	9.122.211	62,35
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000	2.000.000	-	100
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000	0	2.000.000	0
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.500.000	1.500.000	-	100
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.500.000	1.500.000	-	100
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.174.000	7.323.200	3.850.800	65,99
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.866.334.476	5.744.716.978	121.617.498	97,93
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.018.832.675	4.905.883.978	112.948.697	97,75
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	846.662.673	838.423.000	8.239.673	99,03
2.3	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	839.128	410.000	429.128	48,86
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	244.541.390	214.586.971	29.954.419	87,75
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.410.000	7.336.600	73.400	99,01
3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.597.590	87.507.395	90.195	99,90
3.3	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	40.519.800	40.484.950	34.850	99,91
3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.600.000	5.400.000	4.200.000	56,25
3.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.850.000	16.650.00	16.849.999	98,81
3.6	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi	82.564.000	57.208.026	25.355.974	69,29
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	125.783.850	125.596.250	187.600	99,85

4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67.483.850	67.417.250	66.600	99,90
4.2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	58.300.000	58.179.000	121.000	99,74
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.600.000	61.614.232	4.985.768	92,51
5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.600.000	61.614.232	4.985.768	92,51
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	379.700.000	374.286.700	5.413.300	98,57
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.700.000	41.416.500	283.500	99,32
6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	132.700.000	132.364.200	335.800	93,44
6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.400.000	22.846.000	554.000	97,63
6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	181.900.000	177.661.000	4.239.000	97,67
II	Program Kepegawaian Daerah	3.430.054.323	1.759.852.157	1.670.202.166	51,31
7	Pengadaan , Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	936.413.415	217.658.405	718.755.010	23,24
7.1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	12.316.000	2.160.000	10.156.000	23,24
7.2	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	701.682.983	30.936.887	670.746.096	4,41
7.3	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	134.814.432	112.490.891	22.323.541	83,44
7.4	Pengelolaan Data Kepegawaian	33.232.000	22.281.227	10.950.773	67,05
7.5	Evaluasi Data , Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	54.368.000	49.789.400	4.578.600	91,58
8	Mutasi dan Promosi ASN	472.349.152	358.719.266	113.629.886	75,94
8.1	Pengelolaan Mutasi ASN	12.072.800	3.940.000	8.132.800	32,64
8.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	68.622.800	47.264.135	21.358.665	68,88
8.3	Pengelolaan Promosi ASN	391.653.552	307.515.131	84.138.421	78,52
9	Pengembangan Kompetensi ASN	1.870.713.756	1.098.668.504	772.045.252	58,73

9.1	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	58.533.482	41.032.196	17.501.286	70,10
9.2	Koordinasi Dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1.780.255.572	1.043.340.220	736.915.352	58,61
9.3	Fasilitasi Pengembangan Karir dan Jabatan Fungsional	31.924.702	14.296.088	17.628.614	44,78
10	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	150.578.000	84.805.982	65.772.018	56,32
10.1	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	51.261.000	31.642.217	19.618.783	61,73
10.2	Pembinaan Disiplin ASN	31.920.000	21.568.880	10.351.120	67,57
10.3	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	51.971.000	22.170.085	29.800.915	42,66
10.4	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	15.426.000	9.424.800	6.001.200	61,10
	JUMLAH	10.155.420.039	8.306.636.277	1.848.783.762	81,80

Adapun capaian sasaran program dan kegiatan tahun 2021 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Capaian Sasaran Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	100	100	100
2.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100	100	100
2.1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	3	3	100,0
2.1.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	1	1	100,0
2.1.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	1	1	100,0
2.1.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	1	1	100,0
2.1.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	1	1	100,0

	SKPD				
2.1.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja	4	4	100,0
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100	100	100,0
2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12	12	100,0
2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	12	12	100,0
2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	2	2	100,0
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100,0
2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	7	7	100,0
2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor	1	1	100,0
2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	8	8	100,0
2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	12	12	100,0
2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum tamu	12	12	100,0
2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah	12	12	100,0
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	100	100,0
2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	12	12	100,0
2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung atau Bangunan	2	2	100,0
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100,0
2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	12	100,0
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	100	100,0
2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/Jabatan yang terpelihara	1	1	100,0

2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	13	13	100,0
2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin	63	63	100,0
2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	2	2	100,0
2	Program Kepegawaian Daerah Daerah	Persentase Peningkatan SDM Aparatur Melalui Profesionalitas ASN	54,4	71,0	130,5
		Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	70		
2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100	92,54	92,54
2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Formasi Kebutuhan ASN	200	-	-
2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Formasi ASN yang diajukan	200	-	-
2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Pemerosesan Pemberhentian ASN	134	284	211,9
2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Kenaikan Gaji Berka, Cuti PNS, Karpeg, Karis, Karsu dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	1.600	2.413	150,8
2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Data Pegawai dalam Sistem Digital	12	12	100,0
2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Mutasi dan Promosi ASN	100	125,7	125,7
2.02.01	Pengelolaan Muasi ASN	Jumlah Mutasi ASN	100	45	45,0
2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Kenaikan Pangkat ASN	350	912	260,6
2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Promosi ASN	608	436	71,7
2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Kompetensi	100	83,0	83,0
2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan Formal	76	57	75,0
2.03.05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Manajerial	262	262	100,0
2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir, dalam Jabatan Fungsional	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fungsional	155	115	74,2

2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100	209,0	209,0
2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang mendapatkan Penghargaan	100	196	196,0
2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang terevaluasi	37	74	200,0
2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Kasus ASN yang melakukan Pelanggaran terselesaikan	5	5	100,0
2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Pemerosesan Surat Cuti dan Surat Cerai	5	17	340,0

BAB III
RENCANA KERJA TAHUN 2022

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDMD

Tujuan dan Sasaran dari Rencana Kerja Tahun 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah dituangkan di dalam Renstra untuk mendukung Visi dan Misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Tahun 2011-2016 sebagai berikut :

- a. Terwujudnya Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur
- b. Terwujud SDM Aparatur dan Penataan Perundang-Undangan

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah

- a. Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
- b. Peningkatan Profesionalitas Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah
- c. Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan organisasi. Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan, Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2022

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan serta pembiayaannya pada Tahun 2022 untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah akan melaksanakan 2 (Dua) Program, 11 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022 yang dibiayai oleh Dana APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Anggaran Sebesar Rp 9.935.959.657 dengan rincian Belanja Operasi Rp. 9.452.594.857 serta Belanja Modal sebesar Rp. 483.364.800. adapun rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kanupaten/Kota**01. Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Cpaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

03. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

04. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
5. Fasilitas Kunjungan Tamu
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

05. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Pengadaan Peralatan dan Mesi Lainnya
2. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

06. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

07. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan
3. Pemeliharaan Pralatan dan Mesin Lainnya
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program Kepegawaian Daerah

08. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

1. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
2. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
3. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
4. Pengelolaan Data Kepegawaian
5. Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian

09. Mutasi dan Promosi ASN

1. Pengelolaan Mutasi ASN
2. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
3. Pengelolaan Promosi ASN

10. Pengembangan Kompetensi ASN

1. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
2. Koordinasi dan Kerja sama Pelaksanaan Diklat
3. Fasilitasi Pengembangan Karir dan Jabatan Fungsional

11. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

1. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
2. Pembinaan Disiplin ASN
3. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
4. Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pada tahun 2022 Adapun Rincian Target Kinerja dan Anggaran Pada Program 2 (Dua) Program, 11 (Sebelas) Kegiatan, dan 37 (Tiga Puluh Tujuh) Sub Kegiatan dengan Anggaran yang telah disusu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai berikut :

Tabel : 3.1
Rincian Belaja 2022

NO	URAIAN	ANGGARAN
1	BELANJA OPERASI	9.452.594.857
2	BELANJA MODAL	483.364.800
JUMLAH		9.935.959.657

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Anggaran Belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Tahun Anggaran 2022 adalah Belanja Operasi Rp.9.452.594.857 dan Belanja Modal Rp. 483.364.800 dengan jumlah keseluruhan Belanja 9.935.959.657 Adapun Target Kinerja dan Anggaran yang akan dilaksanakan Pada Tahun 2022 Sebagai berikut :

Tabel : 3.2
Rincian Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Serta Pagu Anggaran

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kanupaten/Kota		7.514.531.507
01	Perencanaan Pengagnggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	69.095.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	33.500.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000

3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.250.000
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.250.000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Cpaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	20.380.000
02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	6.284.849.260
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	5.495.903.103
2	Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	785.107.029
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	2 Dokumen	3.839.128
03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00	48.000.000
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	60 Stel	48.000.000
04	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	252.239.636
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 Unit	7.410.000
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	89.600.836

4	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	8 Unit	46.078.800
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	9.600.000
6	Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Bulan	14.550.000
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	85.000.000
04	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	108.364.800
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Unit	108.364.800
05	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	66.600.000
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	66.600.000
06	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	694.097.811
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	36.700.000
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	13 Unit	136.700.000
3	Pemeliharaan Pralatan dan Mesin Lainnya	1 Tahun	27.780.000
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	2 Gedung	492.917.811

	Lainnya		
II	Program Kepegawaian Daerah		2.421.428.150
07	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100,00	478.859.903
1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	200 Formasi	128.693.503
2	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	200 Formasi	50.000.000
3	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	134 SK	141.966.400
4	Pengelolaan Data Kepegawaian	1.600 SK	43.400.000
5	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Bulan	114.800.000
08	Mutasi dan Promosi ASN	100%	969.729.152
1	Pengelolaan Mutasi ASN	100 SK	16.988.800
2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	350 SK	51.988.800
3	Pengelolaan Promosi ASN	608 Orang	900.751.552
09	Pengembangan Kompetensi ASN	100%	797.899.095
1	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	76 Orang	90.577.482
2	Koordinasi dan Kerja sama Pelaksanaan Diklat	262 Orang	606.387.000
3	Fasilitasi Pengembangan Karir dan Jabatan Fungsional	155 Orang	100.934.613

10	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	200 Orang	174.940.000
1	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	100 Orang	50.585.000
2	Pembinaan Disiplin ASN	37 Orang	55.000.000
3	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5 Kasus	49.995.000
4	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	5 Orang	19.360.000
	JUMLAH		9.935.959.657

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) tahun 2022 yang disusun oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan rencana Kerja tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang berjangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana kerja ini memberikan gambaran mengenai program, kegiatan, sasaran, indikator-indikator kerja dan target yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan pada akhir tahun anggaran pelaksanaannya dapat diukur.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2022 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama Tahun Anggaran dan sebagai pengukur capaian kinerja organisasi baik secara tim, individu, maupun institusi wadah organisasi. Disamping itu, untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreatifitas aparatur dalam pelaksanaan disiplin serta loyalitas yang tinggi demi mengemban Visi dan Misi Organisasi untuk menuju Aparatur Pemerintah yang professional, bersih, dan berwibawa serta sebagai pelayan masyarakat yang baik.